



**PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

2023

**RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN
RENJA**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung A Lantai III
Jln. Wolter Monginsidi Telp/Fax. (0541) 6666379 Kode Pos 75511

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B. 213 /BKPSDM/SET-3/784/01/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2024
DAN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar tugas perencanaan kegiatan dan anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diperlukan adanya Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2024 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2024 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

 2. Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2024 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara dengan susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2024 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan tugas Perencanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Tahun 2023;
- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2024 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan secara berkala melaporkan hasil pelaksanaannya; dan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 30 Januari 2023
KEPALA,

H. RAHMADI, S.Sos
PEMBINA
NIP. 19660107 200012 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Masing-masing yang bersangkutan.
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR : B. 213 /BKPSDM/SET-3/784/01/2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2024 DAN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2024
DAN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Pengarah : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Ketua : Sekretaris
Anggota :
1. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
2. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
3. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
4. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi
5. Mukhdan, SE (Perencana Ahli Muda)
6. Beni Siswanto, SE (Analisis SDM Aparatur Ahli Muda)
7. Nuryanti, S.Psi (Analisis SDM Aparatur Ahli Muda)
8. Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian
10. Achmad Solihin, S.Sos, M.Si (Analisis SDM Aparatur Ahli Muda)
11. Aji Rifqi Mirza, S.Kom (Analisis SDM Aparatur Ahli Muda)
12. Muhammad Rifani, S.Sos (Analisis Kepegawaian Ahli Muda)
13. Indah Wahyuniarti, S.Psi (Analisis Kepegawaian Ahli Muda)
14. Luthfi Fachruri, S.Kom (Analisis Kepegawaian Ahli Muda)
15. Muhd. Irfan Setiawan, SH (Analisis SDM Aparatur Ahli Muda)
16. Suherman, SH (Analisis Kepegawaian Ahli Pertama)
17. Hariadi Rifani, S.Sos (Analisis Kepegawaian Ahli Pertama)
18. Ismail Ependi, S.Sos (Analisis Kepegawaian Ahli Pertama)

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 30 Januari 2023

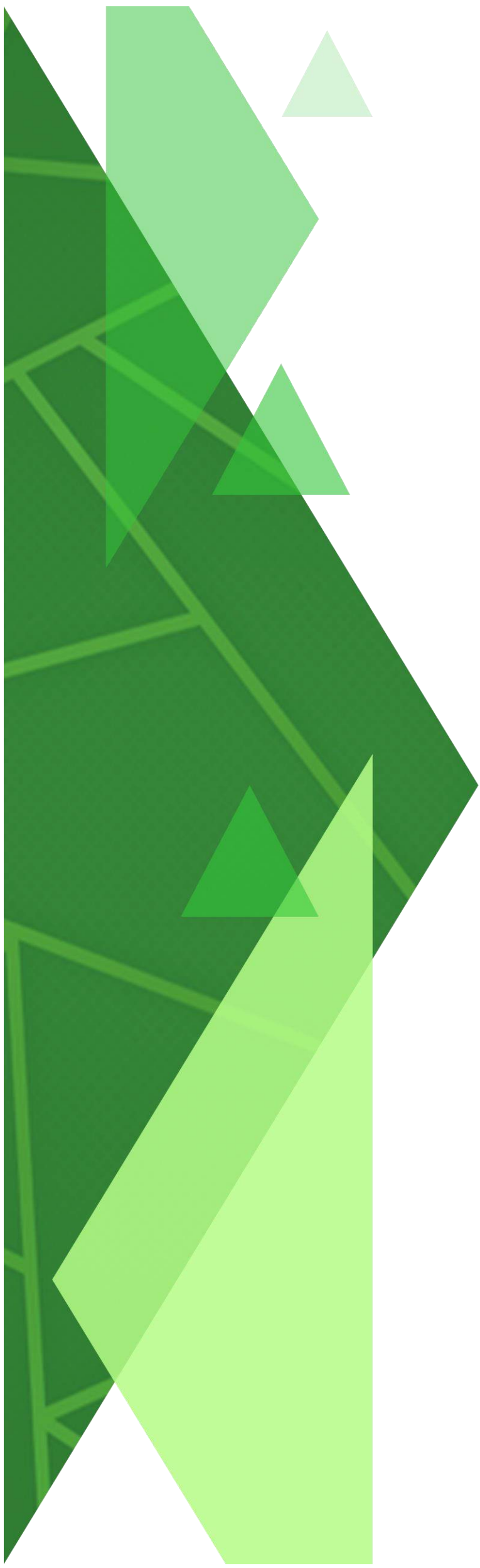

KEPALA,
H. RAKHMADI. S.Sos
PEMBINA
NIP. 19660107 200012 1 003

DAFTAR ISI

Halaman Judul		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Landasan Hukum	I-2
1.3	Maksud dan Tujuan	I-3
1.4	Sistematika Penulisan	I-4
BAB II	EVALUASI RENJA BKPSDM SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	II-8
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM	II-8
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM	II-24
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM	III-28
3.1	Program dan Kegiatan	III-28
BAB IV	PENUTUP	IV-42
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2023 Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2023 BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara	II-19
Tabel 2	Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara	II-25
Tabel 3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023 dan prakiraan maju Tahun 2024 BKPSDM	III-35



BAB I

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2). Hal tersebut dimaksudkan agar rencana pembangunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional merupakan sumbangan dari pencapaian pembangunan daerah secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota dan provinsi, serta kementerian/lembaga. Jenjang perencanaan tersebut berupa perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Dengan demikian daerah menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Secara hierarki penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD P). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Perubahan Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Sejalan dengan dasar pikir di atas maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2023 menyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 dimaksudkan untuk mengoptimalkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan sehingga tercapainya tujuan pelayanan publik di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023 sekaligus dalam upaya pencapaian target sasaran

program yang mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 juga dimaksudkan untuk mengakomodir prioritas yang harus dilaksanakan pada tahun 2023, munculnya tantangan dan peluang baru yang mendukung pencapaian target Renstra, penyesuaian kebutuhan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja serta untuk mengakomodir kebutuhan pengembangan kompetensi di beberapa perangkat daerah yang belum tertuang pada Renja murni tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2023, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1,8201);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. UU nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

19. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
20. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Berdasarkan pertimbangan diatas, Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen Perubahan Renja Tahun 2023 sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menentukan prioritas program satu tahun dan digunakan sebagai pedoman dalam rencana kerja tahunan.
- b. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk menyamakan persepsi dan tercapainya komitmen bersama untuk mencapai tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta memahami dan menilai arah kebijakan dan program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terutama untuk mendukung terlaksananya percepatan Visi dan Misi pertama Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 yaitu Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani.

1.3.2 Tujuan :

- a. Tersedianya Dokumen Perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam kurun waktu 1 tahun sebagai bagian dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Tersedianya pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam kurun waktu satu tahun (2023) dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
- c. Terciptanya keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan aparatur yang terencana dan memiliki akuntabilitas melalui penyusunan rencana kegiatan tahunan.

- d. Tersedianya suatu tolok ukur dalam melakukan evaluasi dan penilaian kinerja tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari 4 (empat) Bab terdiri dari ;

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan gambaran umum tentang penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian tentang Perubahan RENJA-PD, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara RENJA-PD dengan dokumen RKPD, RENSTRA-PD, dengan RENJA K/L DAN RENJA provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang–undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Organisasi Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI RENJA BKPSDM SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA-PD tahun 2023, pelaksanaan sampai dengan triwulan II dan perkiraan capaian tahun berjalan 2023, mengacu pada ABPD tahun berjalan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Perubahan-RENJA PD tahun-tahun sebelumnya.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

3.1 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

- a) Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- b) Pencapaian SDGs,
- c) Pengentasan kemiskinan,
- d) Pencapaian SPM,
- e) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
- f) Dsb.

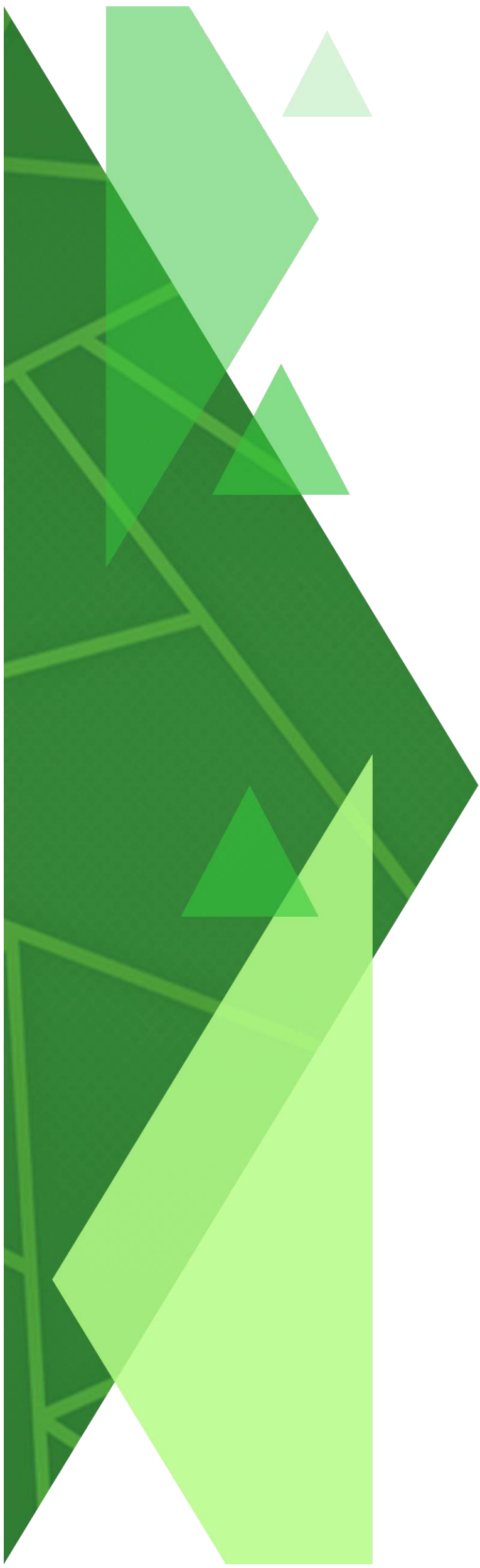
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan Perubahan RKPD/Renstra PD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama PD dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.



BAB II

BAB II

EVALUASI RENJA BKPSDM SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan 3 program dan 13 kegiatan dan 41 sub kegiatan antara lain :

2.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Target kinerja pada tahun 2023 yaitu 85 (Nilai), sedangkan capaian kinerja yaitu 84,94 (Nilai).

Capaian kegiatan dan sub kegiatan yang termasuk dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target kinerja 19 dokumen, dengan realisasi kinerja 9 dokumen (47,37%)
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, target kinerja 2 dokumen, dengan realisasi 0 dokumen (0,00%)
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, target kinerja 15 dokumen, dengan realisasi 8 dokumen (53,33%)
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target kinerja 2 dokumen, dengan realisasi 2 dokumen (100,00%)
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, target kinerja 15 dokumen, dengan realisasi 8 dokumen (53,33%)
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, target kinerja 1.800 ASN, dengan realisasi kinerja 869 ASN (48,28%)
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, target kinerja 1 dokumen, dengan realisasi kinerja 1 dokumen (100,00%)

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, target kinerja 12 dokumen, dengan realisasi 6 dokumen (50,00%)
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, target kinerja 2 dokumen, dengan realisasi kinerja 0 dokumen (0,00%)
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, target kinerja 2 laporan, dengan realisasi 0 laporan (0,00%)
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, target kinerja 2 dokumen, dengan realisasi 0 dokumen (0,00%)
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, target kinerja 1 paket, realisasi kinerja 0 paket (0,00%)
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, target kinerja 50 peserta, realisasi kinerja 0 peserta (0,00%)
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, target kinerja 7 layanan, realisasi kinerja 3 layanan (42,86%)
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, target kinerja 1 paket, realisasi kinerja 1 paket (100,00%)
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, target kinerja 3 paket, realisasi kinerja 1 paket (33,33%)
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, target kinerja 3 paket, realisasi kinerja 2 paket (66,67%)
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, target kinerja 1277 dokumen, realisasi kinerja 0 dokumen (0,00%)
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu, target kinerja 1 laporan, realisasi kinerja 0 laporan (0,00%)
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, target kinerja 1 laporan, realisasi 0 laporan (0,00%)
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, target kinerja 450 dokumen, realisasi kinerja 0 dokumen (0,00%)
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, target kinerja 100,00%, realisasi kinerja 0,00%
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, target kinerja 31 paket, realisasi kinerja 0 paket (0,00%)

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, target kinerja 15 paket, realisasi kinerja 0 paket (0,00%)
 - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target kinerja 12 bulan, realisasi kinerja 6 bulan (50,00%)
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat, target kinerja 1 laporan, realisasi kinerja 0 laporan (0,00%)
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, target kinerja 12 laporan, realisasi kinerja 6 laporan (50,00%)
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, target kinerja 1 laporan, realisasi kinerja 0 laporan (58,33%)
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, target kinerja 12 laporan, realisasi kinerja 6 laporan (50,00%)
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target kinerja 12 unit, realisasi kinerja 6 unit (50,00%)
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, target kinerja 12 unit, realisasi kinerja 5 unit (50,00%)
- 2.1.2 Program Kepegawaian Daerah, dengan indikator Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara, target kinerja pada tahun 2022 yaitu 93%. Sedangkan untuk capaian kinerja masih dalam proses karena dokumen yang dijadikan sebagai dasar perhitungannya masih dalam proses penyusunan.

Capaian kegiatan dan sub kegiatan yang termasuk dalam Program Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, target kinerja 1.147 ASN, realisasi kinerja 175 ASN (15,26%)
 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN, target kinerja 1 dokumen, realisasi kinerja 0 dokumen (0,00%)
 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, target kinerja 1 dokumen, realisasi kinerja 0 dokumen (0,00%)
 - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN, target kinerja 1 dokumen, realisasi kinerja 0 dokumen (0,00%)

- Fasilitasi lembaga profesi ASN, target kinerja 1 lembaga, realisasi kinerja 0 lembaga (0,00%)
- Pengelolaan data Kepegawaian, target kinerja 1 dokumen, realisasi kinerja 0 dokumen (0,00%)
- Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian, target kinerja 1 laporan, realisasi kinerja 0 laporan (0,00%)
- b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
 - Pengelolaan Mutasi ASN, target kinerja 1 dokumen, realisasi kinerja 0 dokumen (0,00%)
 - Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN, target kinerja 1 dokumen, realisasi kinerja 0 dokumen (0,00%)
 - Pengelolaan promosi ASN, target kinerja 1 dokumen, realisasi kinerja 0 dokumen (0,00%)
- c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
 - Peningkatan kapasitas kinerja ASN, target kinerja 470 orang, realisasi kinerja 104 orang (22,13%)
 - Pengelolaan Assesment Center, target kinerja 1 dokumen, realisasi kinerja 0 dokumen (0,00%)
 - Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN, target kinerja 184 orang, realisasi kinerja 33 orang (17,93%)
- d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, target kinerja 1 dokumen, realisasi kinerja 0 dokumen (0,00%)
 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, target kinerja 1 dokumen, realisasi kinerja 0 dokumen (0,00%)
 - Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, target kinerja 1 dokumen, realisasi kinerja 0 dokumen (0,00%)
 - Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai, target kinerja 348 orang, realisasi kinerja 176 orang (50,57%)
 - Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN, target kinerja 1 laporan, realisasi kinerja 0 laporan (0,00%)
 - Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai, target kinerja 35 dokumen, realisasi kinerja 24 dokumen (68,57%)

2.1.3 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan indikator Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan

fungsional. Target kinerja pada tahun 2023 yaitu sebesar 20,65%, sedangkan capaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2023 masih dalam proses perhitungan karena dokumen yang dijadikan sebagai dasar perhitungannya masih dalam proses penyelesaian.

Capaian kegiatan dan sub kegiatan yang termasuk dalam Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
 - Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum, target kinerja 370 orang, realisasi kinerja 249 orang (67,30%)
- b. Kegiatan Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional
 - Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, target kinerja 13 orang, realisasi kinerja 0 orang (0,00%)
 - Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan, target kinerja 5 laporan, realisasi kinerja 0 laporan (0,00%)

Rendahnya capaian kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2023 disebabkan antara lain :

- a. Anggaran pembayaran gaji dan tunjangan ASN eks Dinas ESDM Kabupaten Kutai Kartanegara dan Sekretariat KORPRI Kabupaten Kutai Kartanegara masih teranggarkan pada BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan lembaga diklat terkait sistem pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara unit kerja yang menghambat proses pelaksanaan kegiatan;
- d. Kurangnya kompetensi SDM aparatur pada BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.1.4 Program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program yang mungkin tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran pada tahun 2023 adalah **Program Kepegawaian Daerah**, yang disebabkan belum

selesaiannya penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada tahun berjalan sehingga dasar perhitungan masih menggunakan dokumen yang ditetapkan pada tahun 2021.

Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

- a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN; dan
- b. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK;
- d. Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN;
- e. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
- f. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; dan
- g. Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai.

2.1.5 Program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan
- i. Kegiatan Mutasi dan Promosi.

Sub Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
- f. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
- g. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
- h. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
- i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- j. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- k. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- l. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- m. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- n. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
- o. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- p. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- q. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- r. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- s. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- t. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- u. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- v. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
- w. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian;
- x. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN;
- y. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
- z. Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian;
- aa. Pengelolaan Assesment Center;
- bb. Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
- cc. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN; dan
- dd. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai.

2.1.6 Program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan
- b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

- a. Mutasi dan Promosi ASN;
- b. Pengembangan Kompetensi ASN;
- c. Pengembangan kompetensi Teknis; dan
- d. Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional.

Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

- a. Peningkatan kapasitas kinerja ASN;
- b. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum;
- c. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan.

2.1.7 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan antara lain :

- a. Anggaran pembayaran gaji dan tunjangan ASN eks Dinas ESDM Kabupaten Kutai Kartanegara dan Sekretariat KORPRI Kabupaten Kutai Kartanegara masih teranggarkan pada BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Lemahnya pemahaman terhadap sistem perencanaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Lemahnya koordinasi antar bidang;
- d. Sistem tata kelola pemerintahan masih banyak yang bersifat manual;
- e. Belum ditetapkan Anjab dan ABK Tahun berjalan;
- f. Dokumen Anjab dan ABK Tahun 2021 yang dijadikan dasar perhitungan kebutuhan ASN tidak sesuai dengan kebutuhan OPD dan regulasi terbaru;

- g. Aplikasi pemberhentian belum tersedia secara online;
- h. Kasus-kasus terhambat oleh berkas yang kurang lengkap;
- i. SDM pengelola kasus kurang memahami proses pemberian hukuman disiplin;
- j. Kesadaran PNS untuk membuat Penilaian Prestasi Kerja PNS masih rendah
- k. Format Laporan PPK PNS 2021 sesuai dengan Permenpan 8 sementara PPK PNS 2022 harus mengacu pada Permenpan 6 sehingga banyak PNS yang belum memahami penyusunan SKP sesuai Permenpan.
- l. Pengetahuan terkait dengan penyusunan SKP masih rendah;
- m. Seleksi Penerimaan ASN berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh BKN Pusat;
- n. SOP belum sesuai dengan aplikasi;
- o. SDM Pengelola layanan kurang memahami prosedur layanan;
- p. Perangkat teknologi informasi belum sesuai standar;
- q. Penyusunan Data awal Calon Penerima Beasiswa tidak berbasis data riil sehingga tidak sesuai dengan jumlah pendaftar/penerima Beasiswa;
- r. Belum adanya Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar/Izin Belajar yang disusun dalam rangka pemenuhan dan kebutuhan pengembangan kompetensi jabatan ASN
- s. Aplikasi yang tersedia belum mengakomodir indikator kedisiplinan kepegawaian secara keseluruhan tetapi hanya terkait absensi /rekaman kehadiran pegawai namun untuk daerah terpencil aplikasi tidak dapat diakses karena tidak tersedianya jaringan internet ;
- t. Ketegasan pemerintah daerah untuk melaksanakan ketentuan/peraturan penegakan atas pelanggaran disiplin kepegawaian masih belum maksimal.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan antara lain :

- a. Penerapan teknologi informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja (e-RPJMD, SIPD, SIMDA Keuangan, e-Pantau);
- b. Tersedianya aplikasi penatausahaan keuangan yang memudahkan pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
- c. Penggunaan aplikasi Simda BMD dalam penatausahaan Barang Milik Daerah;
- d. Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau SRIKANDI

Faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan antara lain :

- a. Kerjasama yang dilakukan daerah dengan kementerian/Lembaga/ Penyelenggara Pelatihan;
- b. Regulasi yang mewajibkan PNS harus melaksanakan pengembangan kompetensi minimal 20 JP pertahun;
- c. Pengembangan Kompetensi ASN yang dilaksanakan Secara Online Kolaborasi lintas K/L dalam pelaksanaan Literasi Digital Sektor Pemerintahan;
- d. Penerapan SIASN BKN secara tepat guna dan tepat waktu;
- e. Proses layanan berbasis online dan paperless;
- f. Penggunaan aplikasi layanan kepegawaian yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara melalui Aplikasi SIASN, yang berimplikasi pada beberapa layanan seperti kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun;
- g. Pengembangan Kompetensi ASN yang dilaksanakan Secara Online Kolaborasi lintas K/L dalam pelaksanaan Literasi Digital Sektor Pemerintahan;
- h. Tersedianya aplikasi pelayanan proses ijin perceraian yang terintegrasi dengan aplikasi kepegawaian; dan
- i. Kekeliruan penetapan target kinerja dalam penyusunan rencana kerja tahun 2023 (penetapan target kinerja yang terlalu rendah/kecil).

2.1.8 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Dengan adanya capaian kinerja yang tidak memenuhi target kinerja khususnya pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Kepegawaian Daerah maka seluruh bidang di lingkungan BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara harus bekerja semaksimal mungkin untuk mencapai target kinerja program yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dengan cara melaksanakan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, melakukan evaluasi secara rutin dan berkala serta melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi yang disepakati.

2.1.9 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Perlu dilakukan perencanaan secara sistematis dalam penyusunan rencana kerja, rencana kerja perubahan, penganggaran, dan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta melakukan evaluasi secara rutin dan berkala sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan hasil maksimal.

Untuk lebih jelasnya disajikan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 pada tabel 1a dan 1b sebagai berikut:

Tabel 1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2023
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2023)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
								Target Renja-PD Tahun (2023)	Realisasi Renja-PD Tahun Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	05												
4	05	01		UNSUR PENUNJANG FUNGSI PEMERINTAHAN									
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip	89 Nilai	84,94 Nilai	86 Nilai	Nilai	0,00%		84,94 Nilai	95,44%
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	227 Dokumen	153 Dokumen	19 Dokumen	10 Dokumen	52,63%		163 Dokumen	71,81%
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64 Dokumen	42 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00%		42 Dokumen	65,63%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	150 Laporan	106 Laporan	15 Laporan	8 Laporan	53,33%		114 Laporan	76,00%
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	5 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00%		7 Laporan	53,85%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	164 Laporan	116 Laporan	15 Laporan	7 Laporan	46,67%		123 Laporan	75,00%

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11880 orang/bulan	9679 orang/bulan	1800 orang/bulan	869 orang/bulan	48,28%		10548 orang/bulan	88,79%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	7 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%		8 Laporan	80,00%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	120 Laporan	84 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50,00%		90 Laporan	75,00%
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	20 Dokumen	13 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00%		13 Dokumen	65,00%
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20 Laporan	13 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0,00%		13 Laporan	65,00%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	13 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%		6 Dokumen	46,15%
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	0 Paket	0,00%		1 Paket	33,33%
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	280 Orang	120 Orang	50 Orang	0 Orang	0,00%		120 Orang	42,86%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	46 Layanan	21 Layanan	7 Layanan	3 Layanan	42,86%		24 Layanan	52,17%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%		3 Paket	60,00%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket	9 Paket	3 Paket	1 Paket	33,33%		10 Paket	55,56%
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	18 Paket	9 Paket	3 Paket	2 Paket	66,67%		11 Paket	61,11%
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	40889 Dokumen	37356 Dokumen	1277 Dokumen	0 Dokumen	0,00%		37356 Dokumen	91,36%
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00%		2 Laporan	40,00%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00%		2 Laporan	40,00%
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3250 Dokumen	1900 Dokumen	450 Dokumen	0 Dokumen	0,00%		1900 Dokumen	58,46%

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	200 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00%		100 Persen	100,00%
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	8 Unit	31 Unit	0 Unit	0,00%		8 Unit	80,00%
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	7 Unit	15 Unit	0 Unit	0,00%		7 Unit	77,78%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50,00%		30 Bulan	250,00%
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00%		2 Laporan	40,00%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50,00%		18 Laporan	30,00%
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00%		2 Laporan	40,00%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50,00%		18 Laporan	30,00%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	101 Unit	69 Unit	12 Unit	6 Unit	50,00%		75 Unit	74,26%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	101 Unit	69 Unit	12 Unit	6 Unit	50,00%		75 Unit	74,26%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	Unit	1 Unit	0,00%		2 Unit	
			Program Kepegawaian Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	96 Persen	89,13 Persen	93 Persen	89,13 Persen	95,84%		89,13 Persen	92,84%
			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan	7545 ASN	3463 ASN	1147 ASN	175 ASN	15,26%		3638 ASN	48,22%
			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	10 Dokumen	7 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%		7 Dokumen	70,00%
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	7 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%		3 Dokumen	42,86%

			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	10 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%		6 Dokumen	66,67%
			Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	7 Lembaga	3 Lembaga	1 Lembaga	0 Lembaga	0,00%		3 Lembaga	66,67%
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00%		4 Dokumen	80,00%
			Pengelolaan data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	7 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%		3 Dokumen	42,86%
			Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	7 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00%		3 Laporan	42,86%
			Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang dimutasi dan dipromosikan	15779 ASN	13939 ASN	2928 ASN	1520 ASN	51,91%		15459 ASN	97,97%
			Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	10 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%		6 Dokumen	60,00%
			Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	10 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%		6 Dokumen	60,00%
			Pengelolaan promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	10 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%		6 Dokumen	60,00%
			Pengembangan kompetensi ASN	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi	3080 ASN	1737 ASN	734 ASN	162 ASN	22,07%		1899 ASN	61,66%
			Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	1785 Orang	1023 Orang	470 Orang	104 Orang	22,13%		1127 Orang	63,14%
			Pengelolaan Assesment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesment Center	9 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%		5 Dokumen	55,56%
			Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00%		1 Dokumen	
			Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	563 Orang	186 Orang	184 Orang	33 Orang	17,93%		219 Orang	38,90%
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	73643 ASN	36395 ASN	12607 ASN	3544 ASN	28,11%		39939 ASN	54,23%
			Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%		2 Dokumen	40,00%
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	10 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%		6 Dokumen	60,00%

			Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	10 Laporan	6 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00%		6 Laporan	60,00%
			Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	1740 Orang	365 Orang	348 Orang	176 Orang	50,57%		541 Orang	31,09%
			Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	147 Laporan	77 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00%		77 Laporan	52,38%
			Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	175 Dokumen	43 Dokumen	35 Dokumen	24 Dokumen	68,57%		67 Dokumen	38,29%
			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			0					0	0,00%
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	26,64 Persen	39,98 Persen	20,65 Persen	22,76 Persen	110,22%		62,74 Persen	235,51%
			Pengembangan kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	2496 ASN	1978 ASN	370 ASN	249 ASN	67,30%		2227 ASN	89,22%
			Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2496 Orang	1978 Orang	370 Orang	249 Orang	67,30%		2227 Orang	89,22%
			Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	1245 ASN	1023 ASN	413 ASN	966 ASN	233,90%		1989 ASN	159,76%
			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	47 orang	16 orang	13 orang	0 orang	0,00%		16 orang	34,04%
			Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	10 Laporan	6 Laporan	5 Laporan	0 Laporan	0,00%		6 Laporan	60,00%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

Terbentuknya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara dikarenakan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah berubah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut BKPSDM), Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 atas Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan dirubah kembali melalui Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Lebih lanjut penjelasan mengenai tugas dan fungsi BKPSDM diuraikan bahwa BKPSDM melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan :

“Meningkatnya Profesionalitas ASN Kutai Kartanegara”.

Dengan sasaran :

“Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah”.

Target sasaran pencapaian kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah dapat diuraikan sebagaimana tabel 2 berikut:

Tabel 2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BKPSDM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Indikator*)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun 2023	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indikator Tujuan BKPSDM											
01.00	Indeks Profesionalitas ASN Kutai Kartanegara			61	65	70	75	80	40,45	42,45	65	Kinerja belum mencapai target
	Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM setingkat <i>Impact</i>											
01.00	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM			80	82	85	87	89	83,5	76,33	82	Kinerja belum mencapai target
	Indikator Kinerja Kunci											
1			Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	82	84	86	88	90	36,94	46,68	84	Kinerja belum mencapai target
2			Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	16	18	20	55	24	11,87	10,51	18	Kinerja belum mencapai target
3			Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	5	7	9	11	13	12,96	38,11	7	Target kinerja tercapai
	Indikator Kinerja Program setingkat <i>Outcome</i>											
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			85	86	87	88	89	75,89	84,94	86	Kinerja belum mencapai target
2	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara			92	93	94	95	96	91,5	89,13	93	Kinerja belum mencapai target
3	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional			18,38	20,65	22,64	24,64	26,64	17,22	22,76	20,65	Target kinerja tercapai
	Indikator Kinerja Kegiatan											
1	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			24	23	24	23	23	19	24	19	Target kinerja tercapai

2	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			15	15	15	15	15	12	15	15	Target kinerja tercapai
3	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah			2	2	2	2	2	1	2	2	Target kinerja tercapai
4	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			1	2	2	3	2	1	1	2	Target kinerja tercapai
5	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			7	7	8	8	8	7	6	7	Target kinerja tercapai
6	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	Target kinerja tercapai
7	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			12	12	12	12	12	12	12	12	Target kinerja tercapai
8	Jumlah Barang Milik Daerah			12	12	12	12	12	16	13	12	Target kinerja tercapai
9	Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan			1058	1147	1262	1365	1306	645	1411	1147	Target kinerja tercapai
10	Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan			2790	2928	2583	2495	2473	8143	3286	2928	Target kinerja tercapai
11	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi			560	560	560	360	360	322	735	560	Target kinerja tercapai
12	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya			13084	12607	12093	11491	10854	11438	11443	12607	Kinerja belum mencapai target
13	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis			210	200	200	200	200	280	212	200	Target kinerja tercapai
14	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional			120	122	112	106	112	116	229	122	Target kinerja tercapai

Adapun analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan “Meningkatnya profesionalitas ASN Kutai Kartanegara”

Capaian tujuan Meningkatkan profesionalitas ASN Kutai Kartanegara dengan indikator kinerja “Indeks Profesionalitas ASN” sebesar 69,59% dengan predikat “Rendah”, dimana target pada tahun 2022 sebesar 61,00 terealisasi sebesar 42,45.

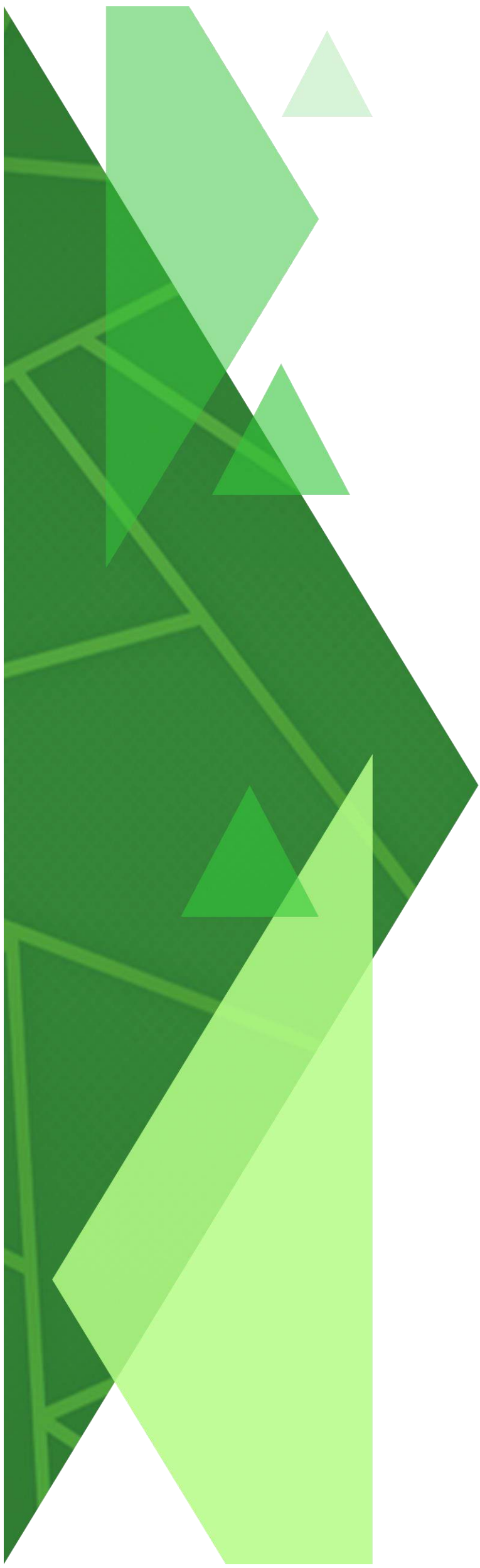
Target kinerja Indeks Profesionalitas ASN tidak tercapai, dengan kendala antara lain :

- a. Masih terdapat 5.145 PNS Kabupaten Kutai Kartanegara yang pendidikannya di bawah S.1;
- b. Pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS belum maksimal; dan
- c. Data kualifikasi, pengembangan kompetensi dan kinerja PNS belum seluruhnya diupdate ke SAPK

2. Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah”

Capaian sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah dengan indikator kinerja “Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM” sebesar 95,41% dengan predikat “Sangat Tinggi”, dimana target pada tahun 2022 sebesar 80,00 terealisasi sebesar 76,33. Target kinerja Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM tidak tercapai, dengan kendala antara lain :

- a. Belum optimalnya koordinasi dengan BKD Provinsi, BKN Regional dan BKN Pusat terkait waktu penyelesaian dokumen kepegawaian;
- b. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat/ASN tentang prosedur layanan serta seluruh layanan BKPSDM tidak dipungut biaya;
- c. Kurangnya respon atas pengaduan, saran dan masukan;
- d. Dominan faktor penghambat pada unsur waktu pelayanan, biaya/tarif dan pengaduan, saran dan masukan;
- e. Capaian 76,33 tergolong dalam kategori kurang baik, selisih 0,28 sudah masuk ke kategori baik
- f. Belum ada ketegasan dari pimpinan terhadap oknum yang melakukan pelanggaran disiplin;
- g. Perubahan regulasi proses layanan kepegawaian terutama terkait dokumen kelengkapan penerbitan Surat Keputusan;
- h. Perubahan aplikasi layanan kepegawaian dari SAPK ke SIASN;
- i. Kurang optimalnya pemahaman pemberi layanan terhadap SOP layanan;



BAB III

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah mencakup urusan, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, indikator kinerja, target, pagu indikatif, pagu prakiraan maju, sumber dana baik yang mengalami perubahan maupun tidak mengalami perubahan. Adapun perubahan yang dilakukan adalah penambahan atau pengurangan akibat adanya pergeseran antar pagu sub kegiatan serta pergeseran rekening belanja dalam satu sub kegiatan.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Perubahan BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, yaitu pada misi pertama “Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani”.
2. Pencapaian tujuan BKPSDM untuk meningkatkan profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah.
4. Penguatan manajemen kinerja BKPSDM berbasis sistem merit.
5. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN berdasarkan analisis kebutuhan yaitu Penyiapan ASN Pendukung Program Kukar Lumbung Pangan Kaltim dan Program Digitalisasi Pelayanan Publik.

3.1 Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 terdiri dari 3 (tiga) Program, 14 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan.
2. Program Kepegawaian Daerah terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan.
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 sebagian besar dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya Tenggarong, kecuali untuk pelaksanaan :

1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN dilaksanakan di Tenggarong, Samarinda, Balikpapan, Bali dan Bandung;
2. Sub Kegiatan Pengelolaan Assesment Center dilaksanakan di Tenggarong dan Samarinda;
3. Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dilaksanakan Samarinda, Makassar, Jakarta, Yogyakarta dan Semarang;
4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum dilaksanakan di Tenggarong, Samarinda dan Yogyakarta;
5. Sub Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan di Kalimantan Selatan; dan
6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan yang dilaksanakan di Samarinda Samarinda bekerja sama dengan LAN Samarinda dan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, Balikpapan, Malang, Bogor dan Jakarta.

Dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan rencana BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023, maka ada perubahan rencana kerja untuk menyesuaikan perkembangan situasi program kegiatan yang dijalankan dan telah dievaluasi sampai dengan triwulan kedua. Pada tahapan ini dilakukan langkah perubahan rencana kerja tahun 2023 untuk menjawab permasalahan dan kendala baik itu indikator kinerja target, pagu dan lokasi dan unit kerja pelaksana serta lokasi masing-masing kegiatan.

Pada Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara tahun 2023 ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan target Renstra disebabkan antara lain capaian kinerja tahun sebelumnya yang sudah melebihi target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Renstra, tindak lanjut atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terkait pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 serta pemenuhan Mandatory Spending peningkatan kompetensi sumber daya manusia (minimal 0,16% dari belanja daerah). Akibat adanya faktor-faktor tersebut, BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara perlu melakukan penyesuaian terhadap rancangan perubahan yang telah disusun sebelumnya.

Meskipun demikian BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara tetap menjaga komitmen terhadap pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Meskipun ada perubahan/penyesuaian kebutuhan dalam rencana kerja, namun tujuan akhir yang ingin dicapai tetap menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan

dan BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara. Dengan melakukan penyesuaian yang bijaksana dan tetap berpegang pada komitmen, diharapkan BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara dapat mencapai hasil yang diharapkan dalam pengembangan sumber daya manusia dan pelayanan publik pada tahun 2023.

Pada tahun 2023, BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara melakukan penyesuaian pagu anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta menambah pagu anggaran Belanja Operasional sebesar Rp. 6.651.739.699,00 sehingga anggaran Belanja Operasional Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia yang semula sebesar Rp. 33.845.455.043,00 menjadi Rp. 40.497.194.742,00.

Ada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dilakukan perubahan baik rasionalisasi anggaran, peningkatan target capaian, penurunan target capaian kinerja maupun penambahan anggaran, antara lain :

1. Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota berupa Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target kinerja 86 direvisi menjadi 92;
2. Indikator kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Manusia berupa Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional dengan target kinerja 20,65% direvisi menjadi 28%;
3. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dirasionalisasi sebesar Rp. 19.890.000,00 dari anggaran semula Rp. 65.000.000,00 menjadi Rp. 45.110.000,00. Hasil rasionalisasi tersebut digeser menambah pagu anggaran Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dirasionalisasi sebesar Rp. 8.500.000,00 dari anggaran semula Rp. 55.000.000,00 menjadi Rp. 46.500.000,00. Hasil rasionalisasi tersebut digeser menambah pagu anggaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
5. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ditambah anggarannya sebesar Rp. 19.890.000,00 dari anggaran semula Rp. 65.000.000,00 menjadi Rp. 84.890.000,00. Pada sub kegiatan ini juga dilakukan revisi target kinerja dari 2 dokumen menjadi 3 dokumen.
6. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dirasionalisasi sebesar Rp. 7.688.721.304,00 dari anggaran semula Rp. 19.663.511.475,00 menjadi Rp. 11.974.790.171,00. Target kinerja disesuaikan dari 1.800 orang/bulan menjadi 1.412 orang/bulan.

Penyesuaian pagu anggaran dan target kinerja ini dilakukan sehubungan dengan mutasi PNS eks Dinas ESDM dan Sekretariat KORPRI Kab. Kutai Kartanegara ke beberapa perangkat Daerah.

7. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya ditambah anggarannya sebesar Rp. 350.480.000,00 dari anggaran semula Rp. 140.000.000,00 menjadi Rp. 490.480.000,00. Penambahan anggaran ini digunakan untuk pengadaan pakaian miskat dan pakaian oleh raga. Pada sub kegiatan ini juga dilakukan revisi target kinerja dari 1 paket menjadi 3 paket.
8. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dihapus, dan pagu anggarannya digeser ke Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
9. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ditambah anggarannya sebesar Rp. 29.500.000,00 dari anggaran semula Rp. 315.000.000,00 menjadi Rp. 344.500.000,00. Pada sub kegiatan ini juga dilakukan revisi target kinerja dari 1 laporan menjadi 2 laporan.
10. Pada Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dilakukan pergeseran antar rekening belanja dan tidak mengalami perubahan anggaran maupun target kinerja.
11. Penambahan Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang dianggarkan sebesar Rp. 225.000.000,00 untuk pengelolaan Website BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara, pembuatan video Core Values ASN Berakhlak dan pembuatan aplikasi SKP.
12. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ditambah anggarannya sebesar Rp. 7.875.173.843,00 dari anggaran semula Rp. 334.426.000,00 menjadi Rp. 8.209.599.843,00. Penambahan anggaran ini digunakan untuk pengadaan aset tetap (PC, Laptop, Scanner, Printer, Video Wall untuk Ruang Rapat dan Server untuk SIMPEG) serta peralatan dan kelengkapan ruang CAT sesuai standar BKN Pusat. Pada sub kegiatan ini juga dilakukan revisi target kinerja dari 31 unit menjadi 226 unit.
13. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ditambah anggarannya sebesar Rp. 521.707.750,00 dari anggaran semula Rp. 100.000.000,00 menjadi Rp. 621.707.750,00. Penambahan anggaran ini digunakan untuk pengadaan meubelair dan kelengkapan ruang CAT sesuai standar BKN Pusat. Pada

sub kegiatan ini juga dilakukan revisi target kinerja dari 15 unit menjadi 157 unit.

14. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ditambah anggarannya sebesar Rp. 14.355.800,00 dari anggaran semula Rp. 170.000.000,00 menjadi Rp. 184.355.800,00. Penambahan anggaran ini digunakan untuk Kebutuhan Jasa Sewa Hosting Dan Domain Aplikasi SIMPEG BKPSDM. Pada sub kegiatan ini juga dilakukan revisi target kinerja dari 1 laporan menjadi 12 laporan.
15. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ditambah anggarannya sebesar Rp. 20.894.920,00 dari anggaran semula Rp. 656.137.568,00 menjadi Rp. 677.031.858,00. Penambahan anggaran ini untuk memenuhi kebutuhan pembayaran Gaji THL Tahun 2023. Pada sub kegiatan ini juga dilakukan revisi target kinerja dari 1 laporan menjadi 12 laporan.
16. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK ditambah anggarannya sebesar Rp. 298.025.000,00 dari anggaran semula Rp. 450.000.000,00 menjadi Rp. 748.025.000,00. Penambahan anggaran ini digunakan untuk Rencana seleksi penerimaan PPPK sesuai usulan kebutuhan formasi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Kemenpan RB RI sejumlah 3.000 formasi. Pada sub kegiatan ini juga dilakukan revisi target kinerja dari 1 laporan menjadi 2 laporan.
17. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian ditambah anggarannya sebesar Rp. 202.210.000,00 dari anggaran semula Rp. 100.000.000,00 menjadi Rp. 302.210.000,00. Penambahan anggaran ini digunakan untuk untuk koordinasi, sosialisasi dan sinkronisasi data pasca proses migrasi sistem baru dari SAPK dan SIASN. Pada sub kegiatan ini juga dilakukan revisi target kinerja dari 1 laporan menjadi 2 laporan.
18. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN ditambah anggarannya sebesar Rp. 262.270.500,00 dari anggaran semula Rp. 1.250.000.000,00 menjadi Rp. 1.512.270.500,00. Penambahan anggaran ini digunakan untuk Peningkatan Kapasitas Kinerja Tim Budaya Kerja Perangkat Daerah 30 orang. Pada sub kegiatan ini juga dilakukan revisi target kinerja dari 470 orang menjadi 500 orang.
19. Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center ditambah anggarannya sebesar Rp. 653.247.000,00 dari anggaran semula Rp. 350.000.000,00 menjadi Rp. 1.003.247.000,00. Penambahan anggaran ini digunakan untuk untuk penilaian kompetensi jabatan administrator perangkat daerah

pemangku SPM dan perangkat daerah penunjang pertanian dalam arti luas. Pada sub kegiatan ini juga dilakukar revisi target kinerja dari 1 dokumen menjadi 2 dokumen.

20. Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dirasionalisasi sebesar Rp. 110.000.000,00 dari anggaran semula Rp. 1.316.061.000,00 menjadi Rp. 1.206.061.000,00. Pada sub kegiatan ini juga dilakukan revisi target kinerja dari 184 orang menjadi 127 orang.
21. Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai dirasionalisasi sebesar Rp. 30.000.000,00 dari anggaran semula Rp. 90.000.000,00 menjadi Rp. 60.000.000,00. Pada sub kegiatan ini juga dilakukan revisi target kinerja dari 348 orang menjadi 176 orang.
22. Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN ditambah anggarannya sebesar Rp. 30.000.000,00 dari anggaran semula Rp. 100.000.000,00 menjadi Rp. 130.000.000,00. Pada sub kegiatan ini juga dilakukan revisi target kinerja dari 1 laporan menjadi 2 laporan.
23. Penyesuaian target kinerja Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai dari 35 dokumen menjadi 2 dokumen karena angka perceraian PNS di tahun 2023 cenderung menurun.
24. Penambahan Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang dianggarkan sebesar Rp. 374.964.820,00 untuk membangun Learning Management System (LMS) bekerja sama dengan Kemeninfo Republik Indonesia.
25. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum ditambah anggarannya sebesar Rp. 2.383.397.000,00 dari anggaran semula Rp. 1.750.000.000,00 menjadi Rp. 4.133.397.000,00. Pada sub kegiatan ini juga dilakukan revisi target kinerja dari 370 orang menjadi 620 orang.
26. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan ditambah anggarannya sebesar Rp. 500.000.000,00 dari anggaran semula Rp. 3.522.098.000,00 menjadi Rp. 4.022.098.000,00.

Untuk lebih jelas mengenai rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada Tabel 3 berikut :

Tabel 3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				33.845.455.043,00				40.497.194.742,00	6.651.739.699,00		19.113.131.535,00
	KEPEGAWAIAN				28.343.357.043,00				31.736.734.922,00	3.393.377.879,00		16.983.131.535,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86	Kab. Kukar	22.983.972.043,00	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	92	Kab. Kukar	24.302.862.422,00	1.318.890.379,00	87	13.418.131.535,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19	Kab. Kukar	185.000.000,00	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	Kab. Kukar	176.500.000,00	- 8.500.000,00	24	185.000.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Kab. Kukar	65.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Kab. Kukar	45.110.000,00	- 19.890.000,00	7	65.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	Kab. Kukar	55.000.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	Kab. Kukar	46.500.000,00	- 8.500.000,00	15	55.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Kab. Kukar	65.000.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Kab. Kukar	84.890.000,00	19.890.000,00	2	65.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15	Kab. Kukar	19.808.511.475,00	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15	Kab. Kukar	12.119.790.171,00	- 7.688.721.304,00	15	10.494.641.295,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1800	Kab. Kukar	19.663.511.475,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1412	Kab. Kukar	11.974.790.171,00	- 7.688.721.304,00	1080	10.344.641.295,00

Bab III – Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Kab. Kukar	50.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Kab. Kukar	50.000.000,00	-	1	50.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Kab. Kukar	95.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Kab. Kukar	95.000.000,00	-	12	100.000.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	2	Kab. Kukar	44.840.000,00	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	2	Kab. Kukar	44.840.000,00	-	2	45.000.000,00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Kab. Kukar	44.840.000,00	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Kab. Kukar	44.840.000,00	-	2	45.000.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1	Kab. Kukar	190.000.000,00	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1	Kab. Kukar	540.480.000,00	350.480.000,00	1	50.000.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Kab. Kukar	140.000.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	Kab. Kukar	490.480.000,00	350.480.000,00		-
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Kab. Kukar	50.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Kab. Kukar	50.000.000,00	-	50	50.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	Kab. Kukar	1.061.000.000,00	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	Kab. Kukar	1.294.500.000,00	233.500.000,00	8	1.136.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Kab. Kukar	150.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Kab. Kukar	150.000.000,00	-	1	150.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Kab. Kukar	150.000.000,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Kab. Kukar	150.000.000,00	-	3	150.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan"	3	Kab. Kukar	200.000.000,00	"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan"	3	Kab. Kukar	200.000.000,00	-	3	200.000.000,00

Bab III – Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1277	Kab. Kukar	21.000.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	Kab. Kukar	-	-	21.000.000,00	1277	21.000.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang disediakan										2	75.000.000,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Kab. Kukar	125.000.000,00	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Kab. Kukar	125.000.000,00	-		1	125.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Kab. Kukar	315.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Kab. Kukar	344.500.000,00	29.500.000,00		1	315.000.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	450	Kab. Kukar	100.000.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	450	Kab. Kukar	100.000.000,00	-		450	100.000.000,00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3		175.000.000,00	175.000.000,00			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Kab. Kukar	434.426.000,00	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Kab. Kukar	8.831.307.593,00	8.396.881.593,00		100	387.750.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	31	Kab. Kukar	334.426.000,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	297	Kab. Kukar	8.209.599.843,00	7.875.173.843,00		1	287.750.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15	Kab. Kukar	100.000.000,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	142	Kab. Kukar	621.707.750,00	521.707.750,00		1	100.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Kab. Kukar	960.194.568,00	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Kab. Kukar	995.444.658,00	35.250.090,00		12	1.119.415.240,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Kab. Kukar	22.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Kab. Kukar	22.000.000,00	-		1	22.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Kab. Kukar	170.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Kab. Kukar	184.355.800,00	14.355.800,00		1	170.000.000,00

Bab III – Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Kab. Kukar	112.057.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Kab. Kukar	112.057.000,00	-	1	100.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Kab. Kukar	656.137.568,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Kab. Kukar	677.031.858,00	20.894.290,00	1	827.415.240,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	12	Kab. Kukar	300.000.000,00	Jumlah Barang Milik Daerah	12	Kab. Kukar	300.000.000,00	-	12	325.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Kab. Kukar	300.000.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Kab. Kukar	300.000.000,00	-	12	325.000,00
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	93	Kab. Kukar	5.359.385.000,00	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	93	Kab. Kukar	7.433.872.500,00	2.074.487.500,00	94	3.565.000.000,00
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan	1147	Kab. Kukar	1.278.324.000,00	Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan	1147	Kab. Kukar	1.778.559.000,00	500.235.000,00	1262	1.325.000.000,00
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Kab. Kukar	75.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Kab. Kukar	75.000.000,00	-	1	75.000.000,00
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	Kab. Kukar	450.000.000,00	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2	Kab. Kukar	748.025.000,00	298.025.000,00	1	450.000.000,00
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	Kab. Kukar	100.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	Kab. Kukar	100.000.000,00	-	1	100.000.000,00
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	Kab. Kukar	500.000.000,00	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	Kab. Kukar	500.000.000,00	-	1	500.000.000,00
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	Kab. Kukar	100.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2	Kab. Kukar	302.210.000,00	202.210.000,00	1	100.000.000,00

Bab III – Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM

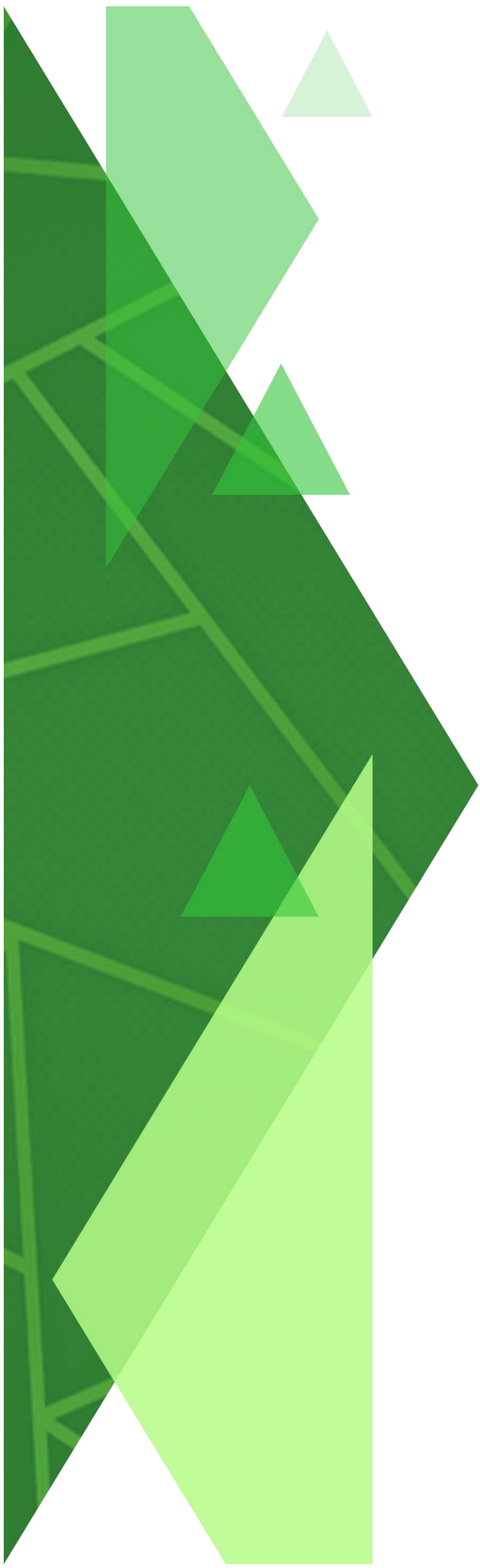
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Kab. Kukar	53.324.000,00	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Kab. Kukar	53.324.000,00	-	1	100.000.000,00
	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan	2928	Kab. Kukar	625.000.000,00	Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan	2928	Kab. Kukar	625.000.000,00	-	2583	625.000.000,00
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1	Kab. Kukar	225.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1	Kab. Kukar	225.000.000,00	-	1	225.000.000,00
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1	Kab. Kukar	200.000.000,00	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1	Kab. Kukar	200.000.000,00	-	1	200.000.000,00
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	Kab. Kukar	200.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	Kab. Kukar	200.000.000,00	-	1	200.000.000,00
	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi	734	Kab. Kukar	2.916.061.000,00	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi	751	Kab. Kukar	4.490.313.500,00	1.574.252.500,00	560	1.075.000.000,00
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	470	Kab. Kukar	1.250.000.000,00	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	544	Kab. Kukar	2.281.005.500,00	1.031.005.500,00	380	350.000.000,00
	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1	Kab. Kukar	350.000.000,00	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2	Kab. Kukar	1.003.247.000,00	653.247.000,00	1	350.000.000,00
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	184	Kab. Kukar	1.316.061.000,00	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	127	Kab. Kukar	1.206.061.000,00	- 110.000.000,00	100	375.000.000,00
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	12607	Kab. Kukar	540.000.000,00	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	12512	Kab. Kukar	540.000.000,00	-	12093	540.000.000,00
	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Kab. Kukar	100.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Kab. Kukar	100.000.000,00	-	1	100.000.000,00
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Kab. Kukar	125.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Kab. Kukar	125.000.000,00	-	1	125.000.000,00

Bab III – Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM

	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Kab. Kukar	75.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Kab. Kukar	75.000.000,00	-	1	75.000.000,00
	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	348	Kab. Kukar	90.000.000,00	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	176	Kab. Kukar	60.000.000,00	- 30.000.000,00	348	90.000.000,00
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	Kab. Kukar	100.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2	Kab. Kukar	130.000.000,00	30.000.000,00	1	100.000.000,00
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	35	Kab. Kukar	50.000.000,00	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	30	Kab. Kukar	50.000.000,00	-	35	50.000.000,00
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	20,65	Kab. Kukar	5.502.098.000,00	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	28	Kab. Kukar	8.760.459.820,00	3.258.361.820,00	22,64	2.130.000.000,00
	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	370	Kab. Kukar	1.750.000.000,00	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	620	Kab. Kukar	4.508.361.820,00	2.758.361.820,00	200	400.000.000,00
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1	Kab. Kukar	374.964.820,00	374.964.820,00		
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	370	Kab. Kukar	1.750.000.000,00	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	620	Kab. Kukar	4.133.397.000,00	2.383.397.000,00	200	400.000.000,00
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	413	Kab. Kukar	3.752.098.000,00	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	413	Kab. Kukar	4.252.098.000,00	500.000.000,00	112	1.730.000.000,00

Bab III – Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM

	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	13	Kab. Kukar	230.000.000,00	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	13	Kab. Kukar	230.000.000,00	-	12	230.000.000,00
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5	Kab. Kukar	3.522.098.000,00	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5	Kab. Kukar	4.022.098.000,00	500.000.000,00	5	1.500.000.000,00



BAB IV

BAB V

PENUTUP

1.1 Catatan Dalam Penyusunan Perubahan Renja

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Perubahan Rencana Kerja Perubahan menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan yang disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang penting sebagai pedoman untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada semester II tahun 2023, menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur, yang selanjutnya akan dikompilasikan di tingkat Pemerintah Daerah menjadi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pencapaian Visi dan Misi Daerah dapat terwujud dengan menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah, maka unsur-unsur organisasi mulai dari Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh pelaksana BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :

1. Melaksanakan Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.
2. Menjaga konsistensi antara dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kutai Kartanegara, Perubahan Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2023
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara tahun 2023.

1.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dari dokumen Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah adanya masukan, informasi, saran dan data dari bidang-bidang sebagai bahan untuk melakukan penyempurnaan sehingga mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Perangkat Daerah maupun di lingkup daerah.

Demikian Dokumen Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 ini dibuat untuk menjadi acuan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tahun 2023 dengan harapan agar dokumen Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 dapat menjadi panduan yang efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tenggarong, 14 Agustus 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kabupaten Kutai Kartanegara,





LAMPIRAN

PERUBAHAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH BKPSDM KAB. KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Indikator	Satuan	APBD 2023		P-RKPD 2023		Bertambah (Berkurang)	Catatan Perubahan
								Target		Target			
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				33.845.455.043,00		40.497.194.742,00	6.651.739.699,00	
5	3				KEPEGAWAIAN				28.343.357.043,00		31.736.734.922,00	3.393.377.879,00	
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86	22.983.972.043,00	92	24.302.862.422,00	1.318.890.379,00	
5	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	19	185.000.000,00	20	176.500.000,00	- 8.500.000,00	
5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	65.000.000,00	2	45.110.000,00	- 19.890.000,00	Efisiensi Belanja
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	15	55.000.000,00	15	46.500.000,00	- 8.500.000,00	Efisiensi Belanja
5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	2	65.000.000,00	3	84.890.000,00	19.890.000,00	Peningkatan kualitas belanja untuk pelaksanaan Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM semester II Tahun 2023
5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	laporan	15	19.808.511.475,00	15	12.119.790.171,00	- 7.688.721.304,00	
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ASN/bulan	1800	19.663.511.475,00	1412	11.974.790.171,00	- 7.688.721.304,00	Penyesuaian kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN setelah rekonsiliasi terkait mutasi PNS eks Dinas ESDM ke beberapa perangkat daerah
5	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	-	
5	3	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	12	95.000.000,00	12	95.000.000,00	-	
5	3	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	dokumen	2	44.840.000,00	2	44.840.000,00	-	
5	3	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	2	44.840.000,00	2	44.840.000,00	-	
5	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	dokumen	1	190.000.000,00	1	540.480.000,00	350.480.000,00	
5	3	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	140.000.000,00	3	490.480.000,00	350.480.000,00	Usul penambahan anggaran untuk pengadaan pakaian olah raga dan baju miskat
5	3	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	-	
5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	6	1.061.000.000,00	7	1.294.500.000,00	233.500.000,00	
5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	-	
5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	-	
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	"Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan"	Paket	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	-	
5	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1277	21.000.000,00	0	-	- 21.000.000,00	- Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dipenuhi dari Jasa Internet - Pagu anggaran digeser ke Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	-	
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	315.000.000,00	2	344.500.000,00	29.500.000,00	Peningkatan kualitas belanja untuk perjalanan dinas biasa
5	3	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	450	100.000.000,00	450	100.000.000,00	-	Pergeseran anggaran antar rekening belanja dalam satu sub kegiatan
5	3	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen			3	225.000.000,00	225.000.000,00	Usul penambahan anggaran untuk pengelolaan Website BKPSDM, pembuatan video Core Values ASN Berakhlak dan pembuatan aplikasi SKP
5	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	434.426.000,00	100	8.831.307.593,00	8.396.881.593,00	
5	3	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	31	334.426.000,00	297	8.209.599.843,00	7.875.173.843,00	Usul penambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengadaan aset tetap (PC, Laptop, Scanner, Printer, Video Wall untuk Ruang Rapat dan Server untuk SIMPEG) serta peralatan dan kelengkapan ruang CAT sesuai standar BKN Pusat

5	3	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15	100.000.000,00	142	621.707.750,00	521.707.750,00	Usul penambahan anggaran untuk pengadaan meubelair dan kelengkapan ruang CAT sesuai standar BKN Pusat
5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	960.194.568,00	12	995.444.658,00	35.250.090,00	
5	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	22.000.000,00	1	22.000.000,00	-	
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	170.000.000,00	12	184.355.800,00	14.355.800,00	Usul penambahan anggaran untuk Kebutuhan Jasa Sewa Hosting Dan Domain Aplikasi SIMPEG BKPSDM, Honorarium PPK dan Tim Pengadaan yg belum dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2023
5	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	112.057.000,00	1	112.057.000,00	-	
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	656.137.568,00	12	677.031.858,00	20.894.290,00	Usul penambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pembayaran Gaji THL Tahun 2023
5	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	-	
5	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	-	
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	Persen	93	5.359.385.000,00	93	7.433.872.500,00	2.074.487.500,00	
						2. Persentase permohonan layanan pengadaan dan pemberhentian ASN yang selesai sesuai SOP	Persen	72,5		72,5			
						3. Persentase data kepegawaian terupdate/terbarukan	Persen	75,5		75,5			
						4. Persentase permohonan layanan mutasi dan promosi yang selesai sesuai SOP	Persen	75		75			
						5. Tingkat Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	34,17		34,17			
						6. Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja di atas 90	Persen	78		78			
						7. Persentase kasus pelanggaran disiplin kepegawaian yang diselesaikan	Persen	77		77			
5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan	ASN	1147	1.278.324.000,00	1147	1.778.559.000,00	500.235.000,00	
5	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	-	
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1	450.000.000,00	2	748.025.000,00	298.025.000,00	Usulan penambahan anggaran untuk rencana seleksi penerimaan PPPK sesuai usulan kebutuhan formasi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Kemenpan RB RI sejumlah 2.999 formasi
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	-	
5	3	2	2.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	-	
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	1	100.000.000,00	2	302.210.000,00	202.210.000,00	Usul penambahan anggaran untuk koordinasi, sosialisasi dan sinkronisasi data pasca proses migrasi sistem baru dari SAPK dan SIASN
5	3	2	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	1	53.324.000,00	1	53.324.000,00	-	
5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan	ASN	2928	625.000.000,00	2928	625.000.000,00	-	
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00	-	
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	-	
5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	-	Pergeseran anggaran dalam satu sub kegiatan
5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi	ASN	734	2.916.061.000,00	751	4.490.313.500,00	1.574.252.500,00	
5	3	2	2.03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	470	1.250.000.000,00	544	2.281.005.500,00	1.031.005.500,00	Usul penambahan anggaran untuk Peningkatan Kapasitas Kinerja Tim Budaya Kerja Perangkat Daerah dan Pengembangan kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama melalui Outbound
5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	1	350.000.000,00	2	1.003.247.000,00	653.247.000,00	Usul penambahan anggaran untuk penilaian kompetensi jabatan administrator perangkat daerah pemangku SPM dan perangkat daerah penunjang pertanian dalam arti luas
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	184	1.316.061.000,00	127	1.206.061.000,00	- 110.000.000,00	Efisiensi belanja

5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	ASN	12607	540.000.000,00	12607	540.000.000,00	-	
5	3	2	2.04	1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	-	
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	-	
5	3	2	2.04	3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	-	Pergeseran anggaran antar rekening belanja dalam satu sub kegiatan
5	3	2	2.04	5	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	348	90.000.000,00	176	60.000.000,00	-	30.000.000,00 Efisiensi belanja
5	3	2	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	1	100.000.000,00	2	130.000.000,00	30.000.000,00	Peningkatan kualitas belanja untuk sosialisasi PP 94 Tahun 2021
5	3	2	2.04	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	35	50.000.000,00	30	50.000.000,00	-	Penyesuaian target kinerja
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	Persen	20,65	5.502.098.000,00	28	8.760.459.820,00	3.258.361.820,00	
5	4	2	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	ASN	370	1.750.000.000,00	620	4.508.361.820,00	2.758.361.820,00	
5	4	2	2.01	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	dokumen			1	374.964.820,00	374.964.820,00	Usul penambahan anggaran untuk pembangunan Learning Management System (LMS)
5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	370	1.750.000.000,00	565	4.133.397.000,00	2.383.397.000,00	Usul penambahan anggaran untuk Pelatihan Pariwisata, Geo Spasial, PBJ level 1, Okupasi PPK, Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar dan Pelatihan Manajemen Agribisnis Sapi Potong
5	4	2	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	ASN	413	3.752.098.000,00	413	4.252.098.000,00	500.000.000,00	
5	4	2	2.02	3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	orang	13	230.000.000,00	13	230.000.000,00	-	
5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	5	3.522.098.000,00	5	4.022.098.000,00	500.000.000,00	Penambahan anggaran Rp. 500.000.000,00 terdiri dari pergeseran anggaran Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN sebesar Rp. 110.000.000,00 dan usul penambahan anggaran baru sebesar Rp. 390.000.000,00 untuk : 1. Kontribusi Pelatihan Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebesar Rp. 300.000.000,00 2. Uang Saku benchmarking PKN TK II dan Studi Lapangan PKP sebesar Rp. 200.000.000,00

